

ABSTRAK

Judul : Evaluasi Area Usaha Pertambangan Timah di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melalui Analisis Sistem Informasi Geografis (SIG)

Nama : Roma Anggiadini

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung merupakan usaha yang menjanjikan dimana salah satu kelebihanannya yaitu dapat memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat setempat serta kabupaten/kota hingga provinsi. Namun, dibalik kelebihan tentu terdapat kelemahan dari kegiatan pertambangan tersebut, seperti maraknya kegiatan pertambangan yang menyalahi aturan, dimana masalahnya adalah adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam Rencana Pola Ruang yang terkandung dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sungailiat yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014. Berdasarkan perda tersebut Kecamatan Sungailiat ditetapkan sebagai kawasan perkotaan yang menandakan bahwa pada kawasan perkotaan tidak diperbolehkan adanya kegiatan penambangan. Hal ini menjadi masalah karena lamanya IUP yang dikeluarkan sebelum adanya perda memiliki jangka perizinan hingga perda telah ditetapkan, serta ada pula IUP yang dikeluarkan dalam status perpanjangan pada saat perda telah ditetapkan. Dalam menganalisis kegiatan pertambangan ini digunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan teknik overlay antar peta Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan peta rencana pola ruang serta peta citra kondisi eksisting. Dalam melakukan analisis dengan teknik overlay melalui SIG ditemukan bahwa lokasi dari IUP terhadap pola ruang didominasi tidak berada pada klasifikasi pola ruang yang semestinya telah ditetapkan yaitu klasifikasi pertambangan yang menandakan bahwa hasil dari analisis tersebut adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai. Kemudian, dalam proses overlay peta pola ruang terhadap peta citra kondisi eksisting menunjukkan hasil bahwa adanya pertambangan indikatif tidak berizin, dikatakan indikatif karena pertambangan ini hanya diketahui melalui peta citra dan tidak kepada kondisi lapangan langsung.

Kata Kunci: pertambangan, RDTR, peraturan daerah, pola ruang, Kecamatan Sungailiat

ABSTRACT

Title : Evaluation of the Tin Mining Business Area in Sungailiat District, Bangka Regency, Bangka Belitung Island Province through Geographical Information System (GIS) Analysis

Name : Roma Anggiadini

Study Program : Urban and Regional Planning

Mining activities carried out by private companies and State-Owned Enterprises (BUMN) in Sungailiat District, Bangka Regency, Bangka Belitung Province are a promising business where one of the advantages is that they can improve the economic situation of the local community as well as districts / cities to the province. However, behind the advantages, of course there are weaknesses of mining activities, such as rampant mining activities that violate regulations, where the problem is the existence of a Mining Business Permit (IUP) that does not comply with the regulations contained in the Spatial Pattern Plan contained in the Detailed Spatial Plan (RDTR). Sungailiat Subdistrict which has been stipulated by Regional Regulation No. 15/2014. Based on this regional regulation, Sungailiat Subdistrict is designated as an urban area, which indicates that mining activities are not allowed in urban areas. This is a problem because the length of time that IUPs were issued prior to the existence of a perda have a licensing period until the perda has been stipulated, and there are also IUPs that were issued in an extended status when the perda has been enacted. In analyzing this mining activity, a Geographical Information System (GIS) is used with an overlay technique between the Mining Business Permit (IUP) map with the spatial pattern plan map and the existing condition image map. In analyzing the overlay technique through GIS, it was found that the location of the IUP against the spatial pattern was dominated not in the spatial pattern classification that should have been determined, namely the mining classification which indicated that the results of the analysis were inappropriate land use. Then, in the process of overlaying the spatial pattern map to the existing condition image map, it shows that the presence of unlicensed indicative mining is said to be indicative because mining is only known through the image map and not directly in the field conditions.

Keyword: mining, RDTR, local regulation, spatial pattern, Sungailiat Sub-district